

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Mewujudkan Kesejahteraan di suatu negara merupakan tujuan utama dan menjadi impian bagi setiap negara. Kesejahteraan bisa didefinisikan menjadi suatu kondisi dimana masyarakat ada dalam keadaan aman, kondisi yang sehat dan makmur. Kesejahteraan juga ialah kondisi yang di cita-citakan oleh semua negara supaya permasalahan sosial, kebutuhan material dapat terselesaikan, dan agama agar bisa hidup dengan layak dan dapat meningkatkan kualitas hidup, maka fungsi sosialnya mampu dijalankan.

Selain itu Perencanaan jangka menengah nasional mementingkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan lima tujuan utama, diantaranya yaitu meningkatkan pembangunan, meningkatkan lingkungan hidup agar lebih berkualitas, mengelola sumber daya alam dengan baik, meningkatkan tingkat hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan yang paling utama, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kehidupan masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila makmur dan bahagia jika masalah kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, kebutuhan dasar, dan pendapatan dapat terselesaikan. Jika kesejahteraan dianggap sebagai tujuan utama dalam strategi sosial jangka menengah, ada prasyarat yang dapat menentukan pencapaiannya. Pemenuhan kebutuhan sosial dan kualitas sumber daya manusia menentukan pra kondisi tersebut. dalam mewujudkan kesejahteraan dan lingkungan

hal ini terlebih dahulu perlu diselesaikan. Menyelesaikannya, bagaimanapun, cukup sulit. Kemiskinan merupakan hambatan sosial yang tidak dapat dihindari oleh negara mana pun untuk mencapai kesejahteraan ini. Dan Pemerintah Indonesia memprioritaskan kesejahteraan.

Dalam Pembukaan UUD 1945, pasal 33 membahas sistem perekonomian dan pasal 34 membahas sistem jaminan sosial dan kepedulian kepada kelompok lemah. Tujuan kesejahteraan tersebut tercantum di dalamnya. Pemerintah Indonesia harus menangani masalah kemiskinan di negaranya sendiri. Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi masalah aktual yang terus diteliti. Kemiskinan adalah masalah penting di negara berkembang. Tidak ada satu pun negara di Bumi yang benar-benar terbebas dari kemiskinan, meskipun tingkatnya berbeda-beda. Contohnya di Indonesia, permasalahan yang harus diatasi dengan serius yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan juga menjadi unsur penting dalam menjadikan negara mampu menaikkan kesejahteraan masyarakatnya yang memiliki tujuan agar angka kemiskinan berkurang.

Gambaran Kemiskinan yaitu sebuah kondisi di mana individu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dirinya secara sosial, dan memanfaatkan kekuatan mental dan fisiknya. Kemiskinan dapat dijelaskan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka tentang sandang, pangan, dan papan (Aprilianti, 2021). Dengan adanya nilai sosial, perbedaan antara orang kaya dan miskin semakin meningkat. Kemiskinan diteliti sebagai masalah yang berkaitan dengan tingkat ekonomi masyarakat yang jelas. Dan menurut (TNP2K, 2015)

Kemiskinan adalah situasi yang berkaitan dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi paket kebutuhan dasar, yang terdiri atas makanan dan non-makanan (pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan sebagainya). Pengertian ini berimplikasi pada strategi pokok penanggulangan kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Jika seseorang memiliki pendapatan yang kecil, mereka dapat mengalami tingkat hidup yang lebih rendah, yang dapat menyebabkan masalah seperti ketidakmampuan untuk membiayai atau mendapatkan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Akibatnya, kemiskinan akan menghambat hak rakyat terhadap berbagai hak pelayanan, seperti kemudahan mendapatkan pendidikan dan akses ke layanan kesehatan.

Problem kemiskinan sudah ada sejak lama. Biasanya, orang miskin tidak hanya karena kekurangan makanan, tetapi juga karena kesulitan dalam hal materi. Sebagai negara besar dengan populasi yang besar, Indonesia seharusnya memiliki potensi untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, meskipun populasi yang besar, Indonesia masih belum mampu menjadi negara yang sejahtera. Indonesia termasuk dalam kategori negara fisik atau ekonomi yang belum maju atau masih berkembang. Krisis moneter Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan tingginya angka kemiskinan dan penurunan kualitas hidup masyarakat dalam hal kesehatan, pendidikan, dan gizi. Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia sudah menganggap membahas kemiskinan secara terbuka sebagai sesuatu yang tidak masuk akal.

Pemerintah selalu merencanakan berbagai cara untuk menyelesaikan kemiskinan. Tetapi cara dari penanggulangan ini berulang kali dianggap tidak mampu menuntaskan masalahnya. Maka dari itu hal tersebut tidak dapat mengatasi kemiskinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru untuk penanggulangan kemiskinan yang mampu menjelaskan akar masalah. Dan semua pihak, termasuk organisasi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya, dan masyarakat. Harus terlibat dalam menanggulangi kemiskinan.

Table 1.1
Jumlah kemiskinan di Kota Bandung

Tahun	Jumlah (ribu jiwa)	Presentase
2019	84,67	3,38%
2020	100,02	3,99%
2021	112,50	4,37%
2022	109,82	4,25%
2023	102,80	3,96%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung Tahun 2023 (data diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan tahunan jumlah kemiskinan di Kota Bandung. Dari tahun 2019 hingga 2021, angka kemiskinan meningkat dan pada tahun 2022 turun. Pada tahun 2019, ada 84,67 ribu orang miskin di Kota Bandung, tetapi pada tahun 2020, ada kenaikan yang signifikan sebanyak 100,02 orang, dan pada tahun 2021, ada kenaikan yang cukup besar sebanyak 84,67 ribu orang.

Karena terus meningkat setiap tahun jumlah masyarakat miskin, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan untuk menanggulangi kemiskinan, seperti memberikan modal, membuat peluang kerja, meningkatkan masyarakat, dan memberikan perlindungan sosial. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2007 untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan mengembangkan kebijakan perlindungan sosial. PKH adalah program bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada keluarga miskin atau rentan yang memenuhi kriteria tertentu. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses keluarga miskin dan rentan kepada bantuan sosial. Adapun Keluarga Miskin (KM) dan rentan berdasarkan Basis Data Terpadu serta memenuhi aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial merupakan Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH). *Conditional Cash Transfer* (CCT) istilah di negara lain yang artinya bantuan tunai bersyarat merupakan istilah lain dari PKH. Tujuan program keluarga Harapan (PKH) yaitu membina rumah tangga yang tidak mampu. Program ini juga berusaha membangun perlindungan sosial bagi masyarakat tidak mampu dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan, menciptakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan bersyarat kepada orang-orang yang tergolong miskin dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga miskin dapat memanfaatkan layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan program

perlindungan sosial lainnya. Hal-hal yang paling penting harus dipenuhi dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ini termasuk nutrisi, pemeriksaan medis, pemeriksaan kandungan untuk ibu hamil, dan imunisasi untuk bayi. Pada bidang pendidikan, peserta PKH harus mensekolahkan anaknya dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Pemerintah Kota Bandung sudah banyak berpartisipasi dalam pelaksanaan program sejak awal mulai. Peraturan Daerah Kota Bandung tahun 2015 tentang penanganan dan penyelenggara kesejahteraan sosial menjadi dasar PKH di kota Bandung. Peraturan ini kemudian diubah menjadi Peraturan Walikota Bandung nomor 18 tahun 2019 tentang pembuktian data dan pembenaran pelaksanaan dan pedomannya. Peraturan ini menyatakan bahwa Dinas Sosial bertanggung jawab atas pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH), dan dibantu oleh koordinator dan pendamping PKH dalam pelaksanaannya.

Tabel 1.2
Jumlah Penerima PKH di Kelurahan Cipedes

No	Tahun	Jumlah
1	2022	721
2	2023	630

Sumber : Portal Data Kota Bandung dan kelurahan cipedes (data diolah peneliti,2024)

Tabel 1.2 menunjukkan penurunan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di kelurahan Cipedes dari 721 menjadi 630 pada tahun 2022–2023. Namun, ada permasalahan dengan hasil pra wawancara oleh Kasi Kesejahteraan Sosial kelurahan cipedes. Menurut Kasi Kesejahteraan Sosial, ada beberapa warga yang seharusnya menerima bantuan PKH tetapi tidak menerimanya, dan ada beberapa

warga yang sebetulnya mampu tetapi menerima bantuan PKH. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa beberapa KPM menyalah gunakan bantuan sosial PKH ini, menyebabkan beberapa KPM tidak menggunakan dana tersebut dengan benar. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa bantuan PKH di kelurahan cipedes ini belum mencapai tujuan yang tepat dan tidak ada pengawasan yang cukup terhadap bantuan yang diberikan kepada KPM.

Adapun Administrasi Publik muncul menjadi studi yang bisa menyelesaikan masalah publik yang rumit. Masalah yang bersifat multi-sektoral merupakan Masalah yang didapati oleh masyarakat dan pemerintahan, dan keterkaitan satu sama lain. Secara luas administrasi publik ini meneltili terkait berbagai fungsi pembuatann keputusan, perencanaann, perunnusan tujuan, dan sasaran. Bersumber permasalahan hasil pra wawancara oleh Kasie Kesejahteraan sosial Kelurahan Cipedes, Peneliti memakai teori fungsi manajemen (Terry, 2015) tentang *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pengerakan), dan *Controlling* (pengawasan) untuk membantu penelitian ini. Karena perencanaan sangat penting untuk mencapai tujuan dan program organisasi, jalan pengelolaan pasti membutuhkan perencanaan yang matang. Menurut (Aini, 2020). perencanaan adalah proses membuat strategi, program, dan tindakan untuk sumber daya organisasi. Akibatnya, agar Program keluarga Harapan (PKH) berjalan dengan baik, administrasi publik sangat penting.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGURANGI ANGKA

KEMISKINAN DI KELURAHAN CIPEDES KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG”

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas peneliti dapat dipahami antara lain:

1. Adanya ketidaktepatan sasaran dalam penerimaan manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Pengawasan yang kurang terhadap peserta KPM pada uang batuan PKH

1.3 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa masalah, termasuk:

- 1 Bagaimana perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung?
- 2 Bagaimana pengorganisasian Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipedes kecamatan Sukajadi Kota Bandung?
- 3 Bagaimana pengarahan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Cipedes kecamatan Sukajadi Kota Bandung?
- 4 Bagaimana pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Cipedes?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan dalam masyarakat miskin di Kelurahan Cipedes;
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengorganisasian Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan dalam masyarakat miskin di Kelurahan Cipedes; dan
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengarahannya Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan di Kelurahan Cipedes.
4. dan juga Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam masyarakat miskin di Kelurahan Cipedes.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk membuka wawasan dan keilmuan baru terkait Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam masyarakat miskin di Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.
 - b. Bisa berkontribusi dalam pengembangan dan pelatihan keahlian berpikir sistematis dan ilmiah. Penelitian ini disusun dari banyak pustaka pada satu wacana baru yang bertujuan memperluas kepustakaan Pendidikan.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini Bermanfaat bagi semua orang akan menghasilkan data dan informasi, terutama bagi masyarakat banyak. membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program tersebut.

- b. Penelitian ini bisa meringankan beban pemerintah atau instansi dalam perumusan kebijakan terkait pengelolaan PKH. Selain itu, penelitian ini dapat dipakai untuk meningkatkan cara pengelolaan PKH sehingga mampu mengurangi kemiskinan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan jalan berpikir yang normalnya ditampilkan pada bentuk diagram dan mempunyai tujuan yakni supaya mampu mendefinisikan seperti apa garis besar penelitian tersebut. Menurut Anggara, (2014) Kerangka berpikir yaitu keterhubungan atau keterpaduan hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang dideskripsikan. Uraian dalam kerangka pemikiran diharapkan menjadi landasan teoritik mengapa masalah yang dihadapi dalam penelitian perlu dipecahkan dengan strategi yang dipilih.

Untuk mempermudah peneliti dan pembaca dalam memahami dan mengetahui tujuan penelitian dari Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, maka diperlukan kerangka pemikiran yang jelas Teori Pengelolaan George R Terry (Terry, 2015) yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan program keluarga harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, maka dapat dikupas dengan 4 dimensi yaitu:

1. *Planning* (perencanaan) yaitu sebuah proses penentuan dan pemikiran mengenai apa yang akan dikerjakan untuk pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Perencanaan ini biasanya berupa konsep atau program kerja.

2. *Organizing* (pengorganisasian) yaitu proses dalam pembagian kerja dan wewenang di antara anggota organisasi dalam mencapai tujuan dengan membuat struktur tugas.
3. *Actuating* (penggerakan) yaitu pengarahan atau penggerakan ini sama dengan motivating yaitu membangkitkan serta mendorong anggota dalam kelompok untuk berusaha keras dalam pencapaian tujuan.
4. *Controlling* (pengawasan) yaitu proses pengarahan dan juga penjagaan yang sungguh-sungguh agar organisasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis

Judul Penelitian :

Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.

Hipotesis Penelitian :

1. **Hipotesis Utama** : Pada Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipedes berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM).
2. **Hipotesis Alternatif** : Pengelolaan yang baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipedes meningkatkan keberhasilan program dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap kesejahteraan sosial.
3. **Hipotesis Nol** : Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipedes tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM).

Hipotesis ini dapat diuji dengan menilai proses pengelolaan PKH melalui Observasi, wawancara dengan informan, serta analisis dampak program terhadap indikator kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Cipedes.